

Muhammadiyah Soroti Dugaan Aliran Dana ACT ke Kelompok Terorisme

written by Ahmad Fairozi



Harakatuna.com. Jakarta - Langkah Bareskrim Polri mengusut dugaan penyelewengan dana umat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dinilai sudah tepat.

Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan aspek yang sekarang ditangani polisi terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan realisasi.

"Pada aspek ini saya kira tindakan polisi bisa dibenarkan," kata Mu'ti, Minggu, 31 Juli 2022.

Mu'ti mengingatkan agar semua pihak tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah dan membiarkan pengadilan yang nantinya memutuskan apakah para tersangka penyelewengan donasi umat itu bersalah atau tidak.

"Biarlah pengadilan yang membuktikan. Semua pihak harus tetap memegang

teguh asas praduga tak bersalah. Pengadilan harus memutus perkara dengan independen, objektif, dan adil,” katanya.

Sementara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai proses hukum yang dilakukan Bareskrim terhadap pendiri maupun petinggi ACT sangat penting.

Ia pun mendorong penegakan hukum berlangsung transparan.

Pria yang akrab disapa Cak Nanto pun menyoroti dugaan aliran dana ACT ke kelompok terorisme.

Menurutnya, jika itu terbukti, maka lembaga ACT harus dibekukan.

“Kalau memang ada terbukti bahwa digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan itu bisa diselidiki, dan dihentikan penggalangan dananya,” ujarnya.

“Tidak hanya menghentikan penggalangan dananya, tapi juga pembekuan kelembagaannya,” kata Cak Nanto.

Cak Nanto mengatakan bahwa, melalui proses hukum ini, donasi yang diselewengkan oleh petinggi ACT nantinya bisa dikembalikan kepada negara atau dihibahkan ke lembaga yang kredible

“Agar dikembalikan kepada pemerintah atau dihibahkan ke LSM yang memiliki kredibilitas atau bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat tersangka penyelewengan donasi ACT, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar, pengawas ACT Hariyana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariadi Imam Akbari.

Mereka juga telah ditahan penyidik Bareskrim pada Jumat (29/7) lalu.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan penahanan dilakukan usai merampungkan proses gelar perkara.

Whisnu menjelaskan penyidik memutuskan untuk menahan keempat orang tersangka itu karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti terkait kasus ini.

“Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap empat tersangka itu karena dikhawatirkan adanya barang bukti yang [dihilangkan](#),” kata Whisnu.